

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat (1) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Partai Politik mengandung arti, yaitu (1) organisasi untuk mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat, (2) keanggotaanya terdiri atas pelaku-pelaku politik dan anggota masyarakat biasa, (3) organisasi yang dibentuk untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara bersaing melalui pemilu, dan (4) kondisi negara yang sesuai adalah sistem demokrasi.²

Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. *Frase* “paling sedikit” menunjukkan syarat ini bersifat imperatif. Konsekuensinya, akan ada akibat hukum bagi partai politik peserta pemilu yang tidak mematuhi.

¹ Riduan Syahrani, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: P.T.Alumni, 2014), h. 274

² Syahril Syarbaini dan Rusdiyanta, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2013), h. 131

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-undang ini, konsekuensi tersebut berbentuk diumumkannya partai politik peserta pemilu yang tidak mampu memenuhi keterwakilan perempuan.³

Jumlah penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 yaitu mencapai 1.046.566 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 546.400 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 518.166 jiwa.⁴ Tuntutan keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam politik . umumnya didasari oleh argumen bahwa untuk memperjuangkan kepentingan perempuan mempengaruhi kebijakan pemerintah maka harus dimulai dengan duduknya perempuan dalam jabatan politik. Kemudian keterwakilan perempuan dalam jabatan politik (legislatif dan partai politik) didasari oleh Persoalan pertimbangan gender tercemin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia.⁵

Studi tentang keterlibatan perempuan dalam politik sudah banyak dilakukan, baik dalam bentuk penelitian, pengabdian, seminar-seminar (lokal, nasional, internasional), diskusi ilmiah, debat, maupun artikel dalam media masa (cetak/audio visual). Hampir semua kajian tersebut membahas kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (keterwakilan politik perempuan). Bila tidak terpenuhi, partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada suatu daerah pemilihan.

Dalam arti, semua bakal caleg yang diajukan gugur akibat tidak terpenuhi syarat

³ Saldi Isra, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 22

⁴ Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/kota Provinsi Riau

⁵ Muhamdam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

keterwakilan perempuan. Konsekuensi berikutnya, partai politik peserta pemilu tidak lagi memiliki kesempatan memperoleh kursi pada dapil yang bersangkutan.⁶

Era reformasi ditandai dengan diamandemennya Undang-undang Dasar 1945, dimana Undang-undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan yang sama bagi setiap orang untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya sendiri, seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, selanjutnya pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 juga mencantumkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang-Undang mengacu pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka jelas sudah ada jaminan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk perempuan.”⁷

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah secara resmi mengesahkan revisi Undang-undang Partai Politik terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam Undang-Undang ini , ada sejumlah pasal perubahan , diantaranya tentang aturan verifikasi partai politik, jumlah sumbangan pengusaha atau badan usaha ke partai politik dan penyelesaian konflik intern partai politik⁸. Meskipun

⁶ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h. 178

⁷ Budiardjodan Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 34

⁸ Muharni, *Kaderisasi Perempuan Partai Politik*, Vol.5 Desember 2018, (Universitas Riau Pekanbaru), h. 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang ini telah mengalami Perubahan tetapi masih terlihat jelas terdapat pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “ Pendirian dan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan⁹.

Penguatan posisi perempuan dalam politik tidak mesti dilakukan dengan membatalkan keikutsertaan seseorang yang kebetulan berada di dapil yang keterwakilan perempuannya tidak mencapai 30%. Sebab, keikutsertaan dalam pemilu merupakan hak konstitusional yang juga wajib dihormati dan dilindungi.¹⁰

Tabel.1.1
Perbandingan keterwakilan Perempuan Pada Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Partai Golkar dan PKS Pemilihan Umum tahun 2019

NO	NAMA PARTA I	DAPIL 1		DAPIL 2		DAPIL 3		DAPIL 4		DAPIL 5		DAPIL 6		DAPIL 7		DAPIL 8	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	GOLKAR	6	3	5	3	4	2	4	3	7	4	4	4	4	4	5	3
KETERWAKILAN PEREMPUAN		33,33%		37,50%		33,33%		42,86%		36,36%		50,00%		50,00%		37,50%	
2	PKS	6	3	5	3	4	2	4	3	3	7	4	5	3	5	5	3
KETERWAKILAN PEREMPUAN		33,33%		37,50%		33,33%		42,86%		36,36%		37,50%		37,50%		37,50%	

Sumber data : KPU Kota Pekanbaru 2019

Dari tabel diatas menjelaskan perbandingan keterwakilan perempuan pada daftar calon sementara anggota DPRD partai Golkar dan PKS pada pemilihan umum tahun 2019. yang terbagi menjadi 8 daerah pilihan yang tiap daerah memiliki jumlah anggota dan persentase yang berbeda. Partai Golkar lebih

⁹ Syahril Syarbaini dan Rusdiyanta, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*,(Bogor:Ghalia Indonesia,2013), h. 24

¹⁰ Saldi Isra, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unggul dari pada partai PKS pada daerah pilihan 7 dan 8 yang memiliki keterwakilan perempuan lebih besar dari pada partai PKS dalam jumlah keseimbangan anggota perempuan dan laki-lakinya.

Perlakuan khusus bagi perempuan diintroduksi kedalam sistem pemilu dengan melakukan pengetaan proses percalonan¹¹. Dalam arti, ruang partai politik peserta pemilu dengan melakukan pengetatan proses memprioritaskan caleg perempuan ditekan sedemikian rupa. Sehingga partai politik peserta tidak memiliki pilihan lain kecuali memberikan perhatian khusus bagi bakal caleg perempuan.¹²

Tabel.1.2
Keterwakilan Perempuan pada Kepengurusan
Partai Politik Golkar Pekanbaru
Periode 2009, 2014, 2019

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA	L	P	PERSENTASE
1	2009	67	51	16	23,8 %
2	2014	215	188	27	12,56%
3	2019	75	46	29	38,6 %

Sumber Data : KPU Kota Pekanbaru 2019

Pada tahun 2009 keterwakilan perempuan partai Golkar 23,8% dari 67 kepengurusan dan tahun 2014 keterwakilan perempuan partai Golkar 12,56% dari 215 kepengurusan sementara pada tahun 2019 mengalami peningkatan keterwakilan perempuan mencapai 38,6%. Tabel diatas menjelaskan posisi yang ditempati perempuan dalam kepengurusan Partai Golkar selama tiga periode sebelumnya yang mengalami peningkatan. Keterlibatan perempuan dalam kepengurusan Partai Golkar memberikan kesempatan bagi perempuana sendiri untuk berpartisipasi secara baik dalam Partai Politik.

¹¹ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), h. 78

¹² *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel.1.3
Perbandingan Keterwakilan Perempuan Kepengurusan Partai Golkar
dan Partai PKS Pekanbaru
Periode 2014 dan 2019

NO	NAMA PARTAI	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA	L	P	PERSENTASE
1	GOLKAR	2014	215	188	27	12,56 %
		2019	75	46	29	38,6 %
2	PKS	2014	31	22	9	31,2 %
		2019	31	21	10	32,2 %

Sumber Data : KPU Kota Pekanbaru 2019

Data tabel diatas menjelaskan perbandingan keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan partai Golkar dan partai PKS Pekanbaru. Tahun 2014 keterwakilan Perempuan partai Golkar 12,56% dari 215 pengurus partai Golkar Pekanbaru. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 38,6% dari 75 pengurus partai Golkar Pekanbaru. Sementara partai politik PKS yang lebih kecil total kepengurusannya pada tahun 2014 sudah memiliki keterwakilan perempuan 31,2% dari 31 pengurus partai PKS Pekanbaru. Pada tahun 2019 keterwakilan perempuan partai PKS 32,2% dari 31 pengurus partai PKS.

Jika dilihat dari partai Golkar yang besar dan sudah lama mestinya memiliki keterwakilan perempuan lebih besar dari yang ditetapkan oleh Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah terdahulu juga mengatur mengenai keterwakilan perempuan dalam Partai Politik, seharusnya Partai Golkar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah mampu memenuhi keterwakilan perempuannya selama dua periode sebelum periode 2019.

Jika tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan tersebut maka Partai Golkar ataupun Partai Politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuannya dalam pendirian dan pembentukan Partai Politik akan mendapatkan akibat hukum dari tidak terpenuhinya keterwakilan perempuannya sesuai dengan Undang-undang yang mengatur. Partai Golkar tidak dapat maju dan mengikuti Pilkada maupun Pemilu karna keterwakilan perempuannya tidak mencapai 30% dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bawaslu. Tetapi pada realitanya selama dua periode sebelum periode 2019 atau periode 2009 dan 2014 Partai Golkar masih mengikuti Pilkada dan Pemilu.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Partai Golkar Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kota Pekanbaru.**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah: Pelaksanaan dan penerapan keterwakilan perempuan pada partai Golkar yang apabila tidak memenuhi keterwakilan perempuannya dalam pembentukan dan pendirian sebuah Partai Politik maka partai yang bersangkutan akan mendapatkan akibat hukum dari tidak terpenuhinya keterwakilan perempuannya. Partai Golkar tidak dibenarkan untuk mengikuti Pilkada dan Pemilu karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bawaslu. Tetapi, pada realinya pelaksanaan sanksi tersebut belum berjalan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi terhadap keterwakilan perempuan didalam Partai Politik Golkar di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?
2. Bagaimana akibat hukum apabila tidak terlaksana Keterwakilan Perempuan terhadap Calon Legislatif pada Partai Golkar berdasarkan Undang-undang No 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Golkar di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila tidak terlaksana Keterwakilan Perempuan terhadap Calon Legislatif pada Partai Golkar berdasarkan Undang-undang No 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai kontribusi pemikiran pada almamater dimana penulis menuntut ilmu.
- c. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis tentang keterwakilan perempuan didalam Partai Politik Golkar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data . Jika dilihat dari sifat penelitiannya penulis melakukan peneitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan bersifat menggambarkan secara tepat sifat-sifat, individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Partai Golkar di JL. Datuk Setia Maharaja No.11, Tengkereng Selatan, Bukit Raya, kota Pekanbaru, Riau. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di kantor Partai Golkar dikarenakan Partai Golkar adalah partai yang sudah besar, partai yang juga

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah lama terbentuk dan didalam Parlemennya Partai Golkar ini merupakan partai yang juga dianggap bagus.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah anggota kepengurusan perempuan Partai Politik Golkar Kota Pekanbaru.
- b. Objek penelitian ini adalah implementasi terhadap keterwakilan perempuan Partai Politik Golkar Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan anggota kepengurusan perempuan partai Golkar di kota Pekanbaru, yang berjumlah 29 orang dari total keseluruhan kepengurusan partai Golkar Kota Pekanbaru yang berjumlah 75 orang.
- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel kepengurusan perempuan pada partai Golkar yang terdiri dari wakil ketua, sekretaris, bendahara beserta anggotanya dengan metode *Purposive Sampling* dengan jumlah populasi sebanyak 29 orang yang diambil dengan metode *Random Sampling*

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 215

¹⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan persentase sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) sehingga jumlah sampelnya sebanyak 8 orang.

Tabel. 1.4
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Ketua bidang	5	2
2	Wakil ketua perbidang	6	0
3	Bendahara	6	1
4	Sekretaris	6	1
5	Anggota	6	4
Jumlah		29	8

5. Sumber Data Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun skripsi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam skripsi ini meliputi wawancara dan observasi tentang keterwakilan perempuan didalam partai politik Golkar di kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, tesis, artikel, disertasi, internet. Data sekunder yaitu data tidak langsung. Dapat diperoleh secara manual, online, atau kombinasi keduanya. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka maupun online yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan

didalam Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁶

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap mengarah pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara ini dimaksud agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.¹⁸

¹⁶ *Ibid.* h. 32

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 72

¹⁸ *Ibid.* h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. **Kepustakaan**

Kepustakaan yaitu penulis mengambil beberapa buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

d. **Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

7 Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengelolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan Metode Deduktif. Metode Deduktif yaitu, suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, terbagi dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai Partai Politik Golkar di kota Pekanbaru. Yang terdiri dari sejarah berdirinya partai Golkar, geografi dan demografi, struktur organisasi partai Golkar dan visi misi partai Golkar Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : KERANGKA TEORI

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori, yang terdiri dari pengertian gender, konvensi penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan, hak konstitusional, partai politik, pemilihan umum dan legislatif.

BAB IV : IMPLEMENTASI TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PARTAI GOLKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DI KOTA PEKANBARU

Bab ini akan membahas mengenai Implementasi terhadap keterwakilan perempuan didalam Partai Politik Golkar di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan faktor pendukung keanggotaan Perempuan di Partai Politik Golkar di Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran.